



Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Tita Antaliana Panni Universitas Sembilanbelas November Kolaka titaantalianapanni@gmail.com Arafat Universitas Sembilanbelas November Kolaka afatpascaunm@gmail.com Rahmat Hidayat Universitas Sembilanbelas November Kolaka rahmataufklarung09@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arafat, Hidayat, R., & Panni, T. A. (2024). Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 62-68.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program KOTAKU Di Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan area Permukiman Kumuh Di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang dan dari hasil pengamatan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan literatur pendukung lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program KOTAKU dalam menurunkan area permukiman kumuh di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adanya 3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3 lingkungan yang ada di kelurahan Kolakaasi masih ditetapkan sebagai lingkungan kumuh, berdasarkan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh. 7 indikator tersebut meliputi kondisi bangunan gedung, jalan, lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran. Dengan permasalahan utama yaitu bangunan gedung, jalan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, proteksi kebaran dengan nilai kekumuhan yang masuk kategori sedang.

Kata Kunci : Efektivitas, KOTAKU, Permkiman Kumuh

Abstract

This research was carried out to determine and describe the effectiveness of the KOTAKU program in Kolaka Regency in reducing slum areas in two sub-districts, namely Sea and Kolakaasi. This research was conducted using qualitative research methods, data was collected from primary data and secondary data. Primary data came from interviews with 12 informants and from observations. Meanwhile, for secondary data, data collection is carried out through library studies and other supporting literature. The data analysis technique used is qualitative data analysis using data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions proposed by Miles and Hubberman. The results of this research indicate that the effectiveness of the KOTAKU program in reducing slum areas in two sub-districts, namely Sea and Kolakaasi, cannot be said to be effective. This is because there are still 3 environments in Sea sub-district and 3 environments in Kolakaasi sub-district which are still designated as slum environments, based on 7 indicators and 19 slum criteria. These 7 indicators include the condition of buildings, roads, environment, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, waste management, and fire protection. With the main problems being buildings, roads, environmental drainage, waste water management and solid waste management, fire protection with a slum value that is in the medium category.

Keywords: Effectiveness, KOTAKU, Slum Settlement

A. Pendahuluan

Permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama di kawasan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru oleh masyarakat urban yang apabila tidak ditangani dengan intens, menyeluruh dan tepat sasaran. Permukiman kumuh menimbulkan berbagai masalah, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, lingkungan permukiman kumuh juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, antara lain dapat mempengaruhi pola perilaku, pola berfikir, dan akan menimbulkan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Permasalahan permukiman kumuh yang ada di Indonesia banyak terdapat pada permukiman di perkotaan. Permukiman kumuh yang dimaksud adalah dari dimensi lingkungan fisik, ekonomi dan juga dimensi sosialnya. Sehingga dari 3 dimensi tadi bisa dilakukan sebuah solusi dan juga tindakan secara nyata agar permukiman kumuh yang selama ini menjadi permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat perkotaan bisa dihadapi dengan bijak.

Ketika dilihat dari kata kunci “kumuh” banyak orang berpendapat berbeda-beda, sehingga memang konsep kumuh yang dimaksud dapat dipahami oleh semua pihak. Menyikapi hal ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali menyusun strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman, terakhir dengan menetapkan kebijakannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh. Dari dasar itu terselenggaranya program lanjutan yang disebut dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dengan diselenggarakannya program KOTAKU ini diharapkan mampu untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada kawasan permukiman kumuh dalam rangka mendukung terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni, produktif. Peningkatan akses tersebut terutama berkaitan dengan kriteria perumahan dan permukiman kumuh diantaranya meliputi: bangunan/gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah/sanitasi, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik (Permen PUPR No. 2 Tahun 2016).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Kabupaten Kolaka Dari tahun 2016 telah mengimplementasikan program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pemerintah Daerah Kolaka melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh semuanya mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten kolaka, APBD Provinsi dan APBN serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pihak ketiga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 tahun 2016 di Sulawesi tenggara tepatnya di Kabupaten Kolaka , Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga merupakan wilayah yang menerima bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) skala kawasan. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Kolaka berdasarkan data (*baseline*) di tahun 2020 mencapai 241,73 hektare. Data tersebut tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga.

Tabel 1. Data Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Kolaka Dan Kecamatan Latambaga

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUASAN KUMUH SK BUPATI	LUAS PENGURANGAN KUMUH (Ha)					CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha)	LUAS KUMUH AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	KOLAKA	WATULIANDU	5,23	0	0	0,05	5,23	0,0	0,0	0,0
		LAMOKATO	10	0	0	0,09	10,0	0,0	0,0	0,0
		LALOHA	9	0	0	0,27	9,0	0,0	0,0	0,0
		LALOMBAA	6	0	0	0,14	6,0	0,0	0,0	0,0
		SABILAMBO	5,5	0	0,35	0,03	3,0	2,5	2,5	0,0
		BALANDETE	7,5	0	0,02	0,56	4,4	0,0	0,0	3,14
		TAHOA	9,5	0	0,02	0	4,3	5,2	5,2	0,0
2	LATAMBAGA	ULUNGOLAKA	5	0	0,09	0,41	5,0	0,0	0,0	0,0
		MANGOLO	5,5	0	0,05	1,1	0,0	5,5	5,5	0,0
		KOLAKAASI	12	0	0,02	0,87	0,0	12,0	12,0	0,0
		SEA	9,5	0	0,12	0,63	5,6	4,0	4,0	0,0
		LATAMBAGA	6,5	0	0	5,60	5,6	0,0	0,0	0,9
		SAKULI	9	0	0,06	0,12	7,5	1,5	1,5	0,0
		INDUHA	5	0	0	0,26	5,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL			105,23	0	0,73	10,13	70,51	30,7	30,7	4,04

Sumber : <http://portal.kolakakab.go.id>

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Program Kotaku di Kabupaten Kolaka melakukan intervensi di 2 (dua) Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan Luas lokasi Kumuh Sesuai SK Bupati No. 188.45/248/2014 yaitu 105,23 Ha. Hingga 2019 luas kumuh tersisa 4,04 Ha. Lokasi kumuh tersebut tersebar di 2 kecamatan yang terdiri dari 14 kelurahan yakni di Kecamatan Kolaka terdiri dari Kelurahan Watuliandu, Lamokato, Laloeha, Lalombaa, Sabilambo, Balandete dan Tahoa. Sementara di Kecamatan Latambaga terdiri dari Kelurahan Ulunggolaka, Mangolo, Kolakaasi, Sea, Latambaga, Sakuli dan Kelurahan Induha. Masalah permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea terjadi dari segi fisik, Adapun masalah-masalah permukiman kumuh di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea menurut Data Program KOTAKU di Kabupaten Kolaka antara lain permasalahan utama adalah genangan dan sedimentasi yang diakibatkan karena kondisi pengikisan tanah di dataran tinggi pada saat musim hujan dan sistem drainase yang tidak layak secara teknis. Selain dari permasalahan sistem drainase yang buruk dan kondisi yang tidak layak teknis penyebab terjadinya genangan dan juga adanya kontur tanah dengan kondisi cekungan sehingga mengakibatkan terjadi genangan di beberapa titik pada kawasan Kolakaasi-Sea sehingga berdampak Kumuh pada permukiman. Sistem Drainase primer terdapat di Jalan Dermaga, Jalan Repelita, Jalan Abadi, Jalan Opo, Jalan Delima dan Jalan Lumba lumba yang terintegrasi dengan semua sub sistem drainase yang ada pada Kawasan Kolakaasi-Sea.

Wilayah kawasan Kolakaasi-Sea berada dipusat Kota dan masuk dalam kawasan strategis bagi Industri perekonomian, sehingga menjadi suatu keharusan untuk melakukan penataan permukiman kumuh di wilayah ini, secara eksisting Kawasan Kolakaasi-Sea memiliki tiga zona dalam kondisi tapaknya, yakni zona perbukitan, zona dataran rendah dan zona Tepi air, maka secara faktual kondisi perbukitan memberikan kontribusi yang besar bagi menumpuknya sedimentasi pada saluran drainase jika datang musim penghujan. Terdapat bak penampung Air PDAM yang ada di jalan Kayangan pada zona perbukitan, yakni ketika Bak penampung itu

dibersihkan maka limbah kapur itu mengalir kebawah dan masuk kesaluran-saluran drainase, sehingga inilah yang menjadikan faktor sedimen menjadi sangat riskan yang pada akhirnya menutup fungsi jaringan saluran drainase pada kawasan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana efektivitas Program KOTAKU Di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan Tingkat Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program KOTAKU Di Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan Tingkat Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut bisa dikatakan efektif. Jadi ketika organisasi tidak mampu mencapai tujuannya maka dapat disimpulkan organisasi tersebut tidak dapat dikatakan efektif (Mardiasmo 2009: 134). Sutrisno (2007: 125) mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan 5 Indikator, yaitu dengan cara:

1. Tepat sasaran, yaitu dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
2. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Menurut Budiani (2007:53), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan cara:

1. Ketepatan Sasaran Program, maksudnya adalah kita dapat melihat apakah program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau sudah tepat berarti program itu dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya kalau sasaran program tidak tepat maka program itu tidak dapat dikatakan efektif.
2. Sosialisasi Program, maksudnya adalah kemampuan dari penyelenggara program dalam mensosialisasikan program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian Tujuan Program, maksudnya adalah apakah hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau sudah berarti program tersebut dapat dikatakan efektif.
4. Pemantuan Program, maksudnya adalah setelah dilaksanakannya program harus ada kegiatan yang dilakukan dalam hal ini memantau anggota penyelenggara program sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggota program.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang dan dari hasil pengamatan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan literatur pendukung lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman.

C. Hasil dan Pembahasan

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen

akses sanitasi layak. Program KOTAKU di kabupaten Kolaka dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut: Kondisi Bangunan Gedung

1. Kondisi Jalan Lingkungan
2. Kondisi Penyediaan Air Minum
3. Kondisi Drainase Lingkungan
4. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
5. Kondisi Pengelolaan Persampahan
6. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik;

Untuk mengurangi tingkat kekumuhan agar tidak semakin kumuh, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan program kotak. Berdasarkan judul penelitian yakni Efektivitas Program Kotaku dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka (Studi Pada Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea). maka hasil menganalisis tentang efektivitas program kotak dalam meningkatkan infrastruktur di kecamatan latambaga (studi pada kelurahan kolakaasi dan sea) mengacu pada teori Budiani (2007:53) yakni sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran Program

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai penanganan program pemukiman kumuh dengan maksud agar program ini memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan berjalan. Kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Program kerja KOTAKU di Kelurahan Kolakaasi dan Sea Kecamatan Latambaga ditujukan sepenuhnya untuk seluruh masyarakat. Program tersebut diantaranya berupa penanganan pemukiman kumuh, peningkatan kualitas kumuh, memberikan pelatihan untuk masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BKM Kolakaasi mengatakan bahwa:

“Program kerja KOTAKU itu sendiri banyak sekali. Program fisik sekitar 80% dan program non fisik sekitar 20%. Adapun program fisik di Kelurahan Kolakaasi seperti pembuatan drainase, jalan setapak, pembuangan air limbah (sanitasi), sumur bor, dan talut. Sedangkan program non fisik berupa pelatihan daur ulang sampah, pelatihan life skill, sosialisasi program, sosialisasi tentang penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan. Untuk sasaran program KOTAKU sudah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, karena sebelum program dijalankan, kami telah melakukan peninjauan di lingkungan yang paling kumuh lalu dilakukan diskusi dengan masyarakat setempat mengenai pembangunan di lingkungan mereka”

Keberhasilan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, ketetapan sasaran program dengan melihat sejauh mana orang menggunakan layanan berbasis inklusi sosial dengan sasaran yang tepat dan yang sudah ditentukan sebelumnya, ketetapan sasaran merupakan acuan dalam sebuah program.

Terkait kesesuaian program KOTAKU dengan kebutuhan dan harapan masyarakat kelurahan Sea dan Kelurahan Kolakaasi untuk saat ini masih sangat kurang memadai. Masyarakat sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya program lanjutan. Sedangkan, pemerintah daerah tidak dapat menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat dikarenakan untuk mendapatkan lanjutan program KOTAKU ditentukan oleh pemerintah pusat.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Komunikasi Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kolaka dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan kumuh, tentunya tidak hanya terletak kepada para

aparatur saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat kota kolaka baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut perlu dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat kota kolaka merupakan objek utama dalam peningkatan kualitas kumuh. Selama ini dinas perumahan dan kawasan pemukiman dalam melakukan sosialisasi program di beberapa media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat adalah dengan menggunakan pamflet, media online KIM kolaka, seperti yang dikatakan oleh ketua BKM Kolakaasi bahwa:

“dalam melakukan sosialisasi terhadap program kotaku kami mengadakan musrembang untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya program kotaku yang menangani pemukiman kumuh yang ada di wilayah masyarakat setempat. Sosialisasi ini juga membahas tentang implementasi program, pemilihan ketua dan anggota, anggaran, dampak pembangunan/implementasi program kotaku dan kebijakan mengenai jika ada tanah masyarakat yang masuk dalam batas pembangunan”

Penyusunan program kerja KOTAKU berdasarkan ide-ide yang berasal dari masyarakat maupun perwakilan masyarakat (RT) yang kemudian dihimpun dan dijadikan acuan untuk menyusun program. Program KOTAKU bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, oleh karena itu dalam kepengurusan, penyusunan dan pelaksanaan program sepenuhnya melibatkan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan internal kebijakan dapat dilihat dari interaksi antar lembaga yang dilibatkan dalam program KOTAKU.

Lembaga yang dilibatkan dalam pelaksanaan program KOTAKU adalah dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan BKM kelurahan Sea dan Kolakaasi. Interaksi antara dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan lembaga BKM dapat dilihat dari koordinasi mereka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang dijalankan. Dalam masalah dana, dinas PUPR juga bekerjasama dengan masyarakat. Dinas PUPR mengurus pencairan dana dari pusat sedangkan BKM yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan besaran dana yang diterima. Walaupun Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta ketua BKM sudah melakukan sosialisasi program, namun kedepannya diharapkan pihak dinas perumahan dan pemukiman harus lebih inovatif dalam menyampaikan informasi dan penggunaan media sosialisasi seperti pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju.

3. Pencapaian tujuan Program

Tujuan (a goal) merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Kegiatan program KOTAKU berdasarkan observasi peneliti bahwa pembangunan sumur bor dapat bermanfaat bagi warga setempat karena tidak menumpang lagi kepada tetangga yang mempunyai sumur bor sendiri. Hasil pembangunan rapatbeton dan jalan setapak yang membantu masyarakat sehingga jalan tidak berdebu dan berlubang lagi ketika dilalui, bertambahnya penerangan jalan sehingga mengurangi banyak masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan dan Perumahan Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa:

“Dampak kebijakan program KOTAKU terhadap bidang sosial adalah dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana. Program kotaku sangat berperan sekali dalam memberdayakan masyarakat, bukan hanya pemberdayaan tapi juga pembangunan. Seperti pembangunan rapatbeton yang bersifat umum, pembuatan sanitasi, pembangunan drainase, pembangunan tempat sampah, penampungan air bersih, serta pelatihan-pelatihan”

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas: Isi Kebijakan (*Content of Policy*), *Type of Benefits* (Tipe Manfaat), *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Masyarakat di Kelurahan Sea dan Kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka menyadari kurangnya pemahaman akan program KOTAKU dikarenakan factor sumber

daya manusia dan prasarana. Namun hal ini bukan menjadi factor yang utama, akan tetapi kurang optimalnya sosialisasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketua BKM sebagai koordinasi pelaksanaan program KOTAKU yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program kotaku setelah program dilaksanakan merupakan salah satu langkah dari pihak dinas perumahan umum dan perumahan rakyat untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik serta untuk memastikan bahwa wilayah penerima program KOTAKU memang masuk dalam kategori perumahan dan kawasan kumuh. Hal ini diperjelas oleh ketua BKM kelurahan Kolakaasi mengatakan:

“setelah melakukan musrembang dengan masyarakat, selanjutnya kami menjalankan atau mengimplementasikan program yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah pusat mengarahkan orang-orang dari jakarta sebagai tim pemantauan yang akan memantau dari penyerahan anggaran sampai pelaksanaan program kotaku berjalan. Namun 2 tahun terakhir ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah dari dinas PUPR tidak pernah meninjau lokasi-lokasi yang telah menjalankan program KOTAKU dikarenakan covid-19”

Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (on-going) tanpa mempertanyakan hubungan kualitas (wollman, 2003P:6)

Pemantauan program merupakan salah satu langkah dari pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kolaka untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik serta untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan permintaan atau tidak. Pemantauan setelah program atau monitoring biasanya para peninjau langsung turun ke tempat-tempat dimana tempat program KOTAKU dilaksanakan. Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Kolakabersama tim monitoring dari pusat melakukan monitoring sebelum dan sesudah program dilaksanakan

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adanya 3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3 lingkungan yang ada di kelurahan Kolakaasi masih ditetapkan sebagai lingkungan kumuh, berdasarkan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh.

Saran peneliti untuk berhasilnya program ini perlu adanya urung rembuk dlam rangka menyatukan ide, keinginan dan gagasan antara masyarakat dan pihak pemerintah, Hendaknya koordinasi antara dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten kolaka dengan pemerintah kelurahan Sea dan Kolakaasi terkait pelaksanaan program KOTAKU lebih diintensifkan dan diperbaiki lagi.

E. Referensi

- Budiani (2007). *Summary Theory And Design*. Ebook
- Mardismo., (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984), *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Akses Bangunan/gedung, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Bersih/minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah Atau Sanitasi, Pengamanan Kebakaran dan Ruang Terbuka Publik
- Peraturan Menteri PUPR Nomor/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-20.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group